



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas – Pelaihari Telp (0511) 21155

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pengelolaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 2025, maka perlu dilakukan penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) seagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, dengan daftar pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
1. Menyusun rencana, melaksanakan kegiatan, mengawasi/monitoring dan evaluasi.
 2. Membuat laporan kegiatan setiap bulan berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan.
 3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada kepala badan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025.
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT,


MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
Perbina TK. I (IV/b)
NIP.19790629 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. TANAH LAUT
NOMOR : 02 Tahun 2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	3	2	3	4
1	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan			
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan			
	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengembangan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Analisis Kerjasama Kebudayaan (Sub Koordinator Ketahanan Seni dan Budaya)	Anggota	
		Analisis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Sub Koordinator Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi)	Anggota	
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Analisis Kerjasama Kebudayaan (Sub Koordinator Ketahanan Seni dan Budaya)	Anggota	
		Analisis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Sub Koordinator Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi)	Anggota	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	3	2	3	4
		Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Pengolah Data	Anggota Anggota	
	4. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Pengembangan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pjt. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Analisis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator Analisis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Pengolah Data	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggota Anggota Anggota Anggota	
	5. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pjt. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Analisis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator Analisis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Pengolah Data	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggota Anggota Anggota Anggota	
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Pengadministrasi Umum (Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan) Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan (Sub Koordinator Bina Ideologi) Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Pengadministrasi Umum (Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan) Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan (Sub Koordinator Bina Ideologi)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggota Anggota Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggota Anggota	
	2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	3	2	3	4
3.	Pembentukan Paskibraka	Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Pengadministrasi Umum (Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan)	Anggota	
		Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan (Sub Koordinator Bina Ideologi)	Anggota	
		Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Pengadministrasi Umum (Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan)	Anggota	
4.	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan (Sub Koordinator Bina Ideologi)	Anggota	
5.	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Pengadministrasi Umum (Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan)	Anggota	
		Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan (Sub Koordinator Bina Ideologi)	Anggota	
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kabid Politik Dalam Negeri		
		Analisis Partai Politik (Sub Koordinator Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Implementasi Kebijakan Oublik dan Pendidikan)	Anggota	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	3	2	3	4
		Analisis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat Pengadministrasi Umum Kabid Politik Dalam Negeri Analisis Partai Politik (Sub Koordinator Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu) Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Implementasi Kebijakan Oublik dan Pendidikan) Analisis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat Pengadministrasi Umum	Anggota Anggota Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggota Anggota Anggota	
	2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabid Politik Dalam Negeri Analisis Partai Politik (Sub Koordinator Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu) Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Implementasi Kebijakan Oublik dan Pendidikan) Analisis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat Pengadministrasi Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggota Anggota Anggota Anggota	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Plt. Kasubag Umum & Kepegawaian Analisis Tata Laksana Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum Pengemudi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggota Anggota Anggota Anggota	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	3	2	3	4
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Plt. Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	1. Pengadaan Mebel	Analisis Tata Laksana	Anggota	
		Pengadministrasi Umum	Anggota	
		Pengadministrasi Umum	Anggota	
		Pengemudi	Anggota	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Plt. Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Analisis Tata Laksana	Anggota	
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadministrasi Umum	Anggota	
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadministrasi Umum	Anggota	
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pengemudi	Anggota	
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
	7. Penyediaan Bahan/Material			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Plt. Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Analisis Tata Laksana	Anggota	
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadministrasi Umum	Anggota	
		Pengadministrasi Umum	Anggota	
		Pengemudi	Anggota	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	3 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Plt. Kasubag Umum & Kepegawaian	3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	4
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Analisis Tata Laksana	Anggota	
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadministrasi Umum	Anggota	
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadministrasi Umum	Anggota	
		Pengemudi	Anggota	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Plt. Kasubag Program dan Anggaran	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bendahara	Anggota	
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota	
		Pranata Komputer Terampil	Anggota	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Plt. Kasubag Keuangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bendahara	Anggota	
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota	
		Pranata Komputer Terampil	Anggota	

KEPALA BADAN KESAKTIAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT,

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19790629 200003 1 004